

## **Analisis Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten/Kota di Pulau Lombok Tahun 2020-2024**

**Fajrian Pratama<sup>1</sup>, Siti Sriningsih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Mataram

fajrian2016@gmail.com<sup>1</sup>, sitisriningsih@unram.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRACT.**

*This study aims to analyze the efficiency of regional spending on education and health functions in districts/cities on Lombok Island during the 2020–2024 period. This study uses a quantitative approach with the output-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) method with the assumption of Variable Returns to Scale (VRS). The data used are secondary panel data sourced from the Directorate General of Fiscal Balance, the Central Statistics Agency, and related agencies. The input variables in this study are education and health spending, while the output variables are education and health performance indicators. The results show that in the education sector, all districts/cities on Lombok Island are in the efficient category, although there are differences in the level of consistency of achievement between regions and between years, with Mataram City consistently being on the efficiency frontier. In the health sector, all districts/cities also show a good level of efficiency in managing health spending. This finding shows that the efficiency of regional spending is not only influenced by the size of the budget allocation, but also by the effectiveness of budget management and the quality of policy governance in producing development output achievements. The results of this study are expected to be evaluation material for regional governments in improving the quality of public spending management, especially in the education and health sectors.*

**Keywords: Regional Government Expenditure; Efficiency; Data Envelopment Analysis (DEA); Education; Health**

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi belanja daerah pada fungsi pendidikan dan kesehatan kabupaten/kota di Pulau Lombok selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) berorientasi output dengan asumsi Variable Returns to Scale (VRS). Data yang digunakan merupakan data panel sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait. Variabel input dalam penelitian ini adalah belanja pendidikan dan belanja kesehatan, sedangkan variabel output berupa indikator kinerja pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sektor pendidikan seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok berada pada kategori efisien, meskipun terdapat perbedaan tingkat konsistensi capaian antar daerah dan antar tahun, dengan Kota Mataram secara konsisten berada pada frontier efisiensi. Pada sektor kesehatan, seluruh kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam pengelolaan belanja kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan anggaran dan kualitas tata kelola kebijakan dalam menghasilkan capaian output pembangunan. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan belanja publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

**Kata kunci: Belanja Daerah; Efisiensi; Data Envelopment Analysis (DEA); Pendidikan; Kesehatan**

## PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Oltulular, 2025). Pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai dua sektor strategis karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, produktivitas tenaga kerja, serta daya saing daerah (Armin Rahmansyah Nasution et al., 2024). Oleh karena itu, efisiensi belanja publik pada sektor pendidikan dan kesehatan menjadi isu yang krusial dalam perumusan dan kebijakan pembangunan daerah (Muhammad Rizal et al., 2023)

Dalam Kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan daerah, termasuk dalam pengalokasian belanja pendidikan dan kesehatan (Nuryadin et al., 2020). Desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran publik karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan dan karakteristik wilayahnya (Silfia et al., 2021). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kinerja sektor publik secara proposional, sehingga menimbulkan permasalahan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah (Aznurita et al., 2024)

Pada konteks regional, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok, menunjukkan dinamika capaian pembangunan yang beragam antar Kabupaten/Kota. Misalnya di sektor pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) nasional pada tahun 2024 berada pada kisaran 8,9 tahun. Kota Mataram berada pada standar nasional dengan capaian 9,58 tahun, sedangkan Kabupaten lainnya seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara masih berada pada kisaran 6,4-7,36 tahun, jauh dibawah rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Pada indikator Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APMSMP), capaian nasional berada pada 80,65 persen namun beberapa daerah di Pulau Lombok seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah masih berada pada kisaran 75,9-80,23 persen (BPS, 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah pertama masih belum merata meskipun alokasi anggaran pendidikan relative besar.

Kondisi serupa terjadi pada sektor kesehatan. Pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup (AHH) Nasional Berada Pada Kisaran 74,15 tahun. Kota Mataram berada di atas standar nasional dengan capaian 74,83 tahun, sedangkan kabupaten lainnya di Pulau Lombok masih berada di bawah standar nasional, mengindikasikan bahwa peningkatan belanja kesehatan belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara optimal. Variasi capaian pendidikan dan kesehatan tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan kinerja pembangunan

antar daerah di Pulau Lombok, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran (Sriningsih et al., 2024).

Di sisi lain, belanja pendidikan dan kesehatan merupakan belanja wajib (mandatory spending) yang menyerap porsi signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Herrera et al., 2025). Meskipun sebagian besar pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan alokasi minimal belanja pada kedua sektor tersebut, capaian output pendidikan dan kesehatan yang dihasilkan masih bervariasi antar daerah (Indriani & Muhsyaf, 2025). Hal ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi dalam pengelolaan belanja publik daerah, khususnya dalam mengonversi input anggaran menjadi output pembangunan yang diharapkan (Sriningsih et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efisiensi belanja publik pada sektor pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian Sriningsih et al. (2024) dengan judul “Determinants of Spending Efficiency for Education and Health Functions” yang berfokus pada Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) model Variabel Return to Scale (VRS) berorientasi output serta regresi Tobit untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi skor efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan di NTB belum efisien dengan skor rata-rata 0,87, sedangkan belanja kesehatan relatif efisien dengan skor 0,95. Faktor signifikan yang memengaruhi efisiensi pendidikan yaitu kapasitas pemerintah, kepadatan penduduk, ketimpangan pendapatan (positif), dan rasio guru terhadap siswa (negatif). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Indriani & Muhsyaf (2025) “Efficiency Analysis of Government Expenditure in Districts/Cities of West Nusa Tenggara Province: A DEA Approach (2021–2023)” yang menunjukkan bahwa hanya sebagian daerah di NTB yang mampu mengonversi belanja publik menjadi capaian pendidikan dan kesehatan yang optimal. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya menganalisis wilayah Provinsi NTB secara agregat dan belum memberikan perhatian khusus pada wilayah Pulau Lombok sebagai satu kesatuan regional.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat celah penelitian dalam kajian efisiensi belanja daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya analisis yang dilakukan secara simultan pada level kabupaten/kota dengan fokus wilayah Pulau Lombok. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi belanja daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan di kabupaten/kota di Pulau Lombok selama periode 2020–2024 serta mengidentifikasi kabupaten/kota yang efisien dan belum efisien dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kesehatan selama periode penelitian dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) berorientasi output dan asumsi Variable Return to Scale (VRS). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur mengenai efisiensi belanja publik daerah serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan dan kesehatan yang lebih efektif.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Produksi

Dalam konteks sektor publik, teori produksi menjelaskan proses transformasi input menjadi output melalui aktivitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik (Sriningsih, 2024). Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, sektor publik bertujuan memaksimalkan kesejahteraan sosial, sehingga output yang dihasilkan bersifat non-profit dan multidimensi (Afonso & Kazemi, 2016). Input sektor publik mencakup sumber daya fiskal, tenaga kerja, serta sarana dan prasarana, sedangkan output direpresentasikan melalui capaian kinerja layanan publik, seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat (Sriningsih, 2024).

Konsep teori produksi dalam Coelli et al. (2005) menjelaskan kemampuan atau proses dalam menghasilkan output yang dimana produsen dalam hal ini Kabupaten/Kota menggunakan input yaitu belanja daerah seefisien mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal. Pada sektor pendidikan dan kesehatan, belanja daerah berperan sebagai input utama yang digunakan pemerintah daerah untuk menghasilkan output berupa peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Angka Harapan Hidup (AHH) (Hibatulmedina & Rambe, 2022).

Hubungan input-output ini menjadi dasar konseptual dalam pengukuran efisiensi belanja publik, karena kinerja pemerintah daerah dinilai dari kemampuannya dalam mengonversi input anggaran menjadi output pembangunan yang optimal (Kurniawan et al., 2021). Dengan demikian, teori produksi sektor publik relevan sebagai landasan konseptual dalam memahami mekanisme kerja Data Envelopment Analysis (DEA) yang mengukur efisiensi relatif antar Decision Making Unit (DMU), dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota (Simar & Wilson, 2008).

### Teori Efisiensi

Konsep efisiensi pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Farrell, (1957), yang membedakan efisiensi menjadi efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis menggambarkan kemampuan suatu unit dalam menghasilkan output maksimum dari sejumlah input tertentu, sedangkan efisiensi alokatif berkaitan dengan kemampuan memilih kombinasi input yang optimal berdasarkan harga relatif input. Kombinasi keduanya menghasilkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan (Arsad, 2024).

Dalam penelitian ini fokusnya pada efisiensi teknis, yaitu mengalokasikan input seefisien mungkin untuk menghindari pemborosan sumber daya. Dalam penelitian ini yang menjadi produsen adalah pemerintah daerah, maka efisiensi teknis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana mengalokasikan anggaran untuk menghasilkan output yang maksimum dengan input yang ada (Nuryadin et al., 2020). Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dikembangkan berdasarkan konsep efisiensi teknis dengan membandingkan kinerja relatif antar DMU tanpa memerlukan asumsi bentuk fungsi produksi tertentu (Boakye et al.,

2024). DEA mengidentifikasi unit yang berada pada efficient frontier sebagai benchmark, sementara unit di bawah frontier dinilai belum efisien (Guevel et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan DEA berorientasi output dengan asumsi Variable Return to Scale (VRS), yang menekankan pada kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan output pendidikan dan kesehatan dengan tingkat belanja yang tersedia (Sriningsih et al., 2024). Pemilihan orientasi output didasarkan pada karakteristik belanja pendidikan dan kesehatan yang bersifat wajib (mandatory spending), sehingga ruang kebijakan pemerintah daerah lebih realistis diarahkan pada peningkatan capaian output dibandingkan pengurangan input anggaran (Hibatulmedina & Rambe, 2022).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan output-oriented dan asumsi Variable Return to Scale (VRS) (Setyowati & Solihin, 2024). Metode ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi teknis belanja daerah pada fungsi pendidikan dan kesehatan kabupaten/kota di Pulau Lombok Tahun 2020-2024. Pendekatan kuantitatif dipilih karena seluruh variabel penelitian dinyatakan dalam bentuk data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara objektif.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup lima kabupaten/kota di Pulau Lombok, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, selama periode 2020–2024. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI untuk data realisasi belanja pendidikan dan kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk indikator pendidikan, serta Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk indikator kesehatan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Lombok periode 2020-2024 berjumlah 5 Kabupaten/Kota yang diperlakukan sebagai Decision Making Unit (DMU). Dalam analisis DEA, Fungsi Pendidikan dan Kesehatan digunakan sebagai input, variabel input meliputi realisasi belanja daerah fungsi pendidikan dan belanja daerah fungsi kesehatan (Rahmawati & Muhsyaf, 2025). Variabel output pendidikan terdiri dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Murni (APM) SD, dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP. Sementara itu, variabel output kesehatan meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (AKB), dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (AKI). Berdasarkan teori efisiensi, yaitu semakin sedikit penggunaan anggaran atau input untuk menghasilkan jumlah output tertentu, maka semakin nilai efisiensi tersebut (Sriningsih et al., 2024).

**Tabel 1. Klasifikasi DMU Kabupaten/Kota di Pulau Lombok**

No	Kabupaten/Kota	DMU
1	Kota Mataram	DMU 1

2	Kabupaten Lombok Barat	DMU 2
3	Kabupaten Lombok Tengah	DMU 3
4	Kabupaten Lombok Timur	DMU 4
5	Kabupaten Lombok Utara	DMU 5

**Table 2. Klasifikasi Variabel Input dan Output**

Variabel	Pendidikan	Kesehatan
Variabel Input	Anggaran Belanja Pendidikan	Anggaran Belanja Kesehatan
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Angka Harapan Hidup (AHH)
Variabel Output	Angka Partisipasi Murni SD (APMSD)	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (AKB)
	Angka Partisipasi Murni SMP (APMSMP)	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (AKB)

Teknik analisis data yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan output-oriented dan asumsi Variable Return to Scale (VRS). Pendekatan output-oriented digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan capaian output pendidikan dan kesehatan dengan tingkat input anggaran yang tersedia. Asumsi VRS dipilih karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kapasitas fiskal yang berbeda, sehingga hubungan antara input dan output tidak selalu bersifat proporsional (Hibatulmedina & Rambe, 2022; Sriningsih et al., 2024).

Model DEA dipilih karena mampu mengatasi tantangan model konsekuensi yang kompleks yang merujuk pada teori, atau dengan kata lain, model DEA tidak bergantung pada teori (Sriningsih et al., 2024). Dalam penelitian ini, metode Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengukur nilai efisiensi teknis dan biaya sistem dengan menggunakan perangkat lunak DEAP 2.1 untuk mengevaluasi hubungan antara input dan output.

Dalam Data Envelopment Analysis (DEA), skor efisiensi berada pada rentang 0–1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat efisiensi relatif yang tinggi dari suatu DMU (Kusumaningsih et al., 2023). Dalam praktik empiris, skor efisiensi pada atau mendekati  $\geq 0,95$  umumnya dikategorikan sebagai unit yang efisien atau hampir efisien dibandingkan DMU lain dalam frontier DEA (Coelli et al., 2005). Hasil perhitungan efisiensi selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk membandingkan tingkat efisiensi antar kabupaten/kota dan antar tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Anggaran Pendidikan

Pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka desentralisasi

fiskal, belanja pendidikan menjadi salah satu komponen belanja wajib (mandatory spending) yang harus dialokasikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan dan proporsi belanja pendidikan menjadi penting untuk menilai komitmen dan prioritas pemerintah daerah dalam pembangunan sektor pendidikan.

**Tabel 3. Anggaran Pendidikan Tahun 2020-2024**

DMU	Total Belanja Daerah	Belanja Pendidikan	Persen
2020-Mataram	1.457.702.553.197,18	307.824.986.137,00	21.12
2020-Lombok Barat	1.784.074.477.631,73	500.366.207.199,98	28.05
2020-Lombok Tengah	2.093.636.570.402,34	646.785.614.251,31	30.89
2020-Lombok Timur	2.596.077.594.958,00	884.215.445.322,72	34.06
2020-Lombok Utara	869.716.236.909,80	222.781.370.342,00	25.62
2021-Mataram	1.382.352.867.747,00	352.044.815.995,00	25.47
2021-Lombok Barat	1.661.844.691.560,00	503.354.883.488,44	30.29
2021-Lombok Tengah	2.118.548.957.565,00	720.362.541.483,58	34.00
2021-Lombok Timur	2.732.612.385.851,00	903.097.854.862,26	33.05
2021-Lombok Utara	850.529.068.508,00	251.597.109.340,21	29.58
2022-Mataram	1.464.164.668.856,00	271.808.357.049,00	18.56
2022-Lombok Barat	1.740.587.495.615,00	535.991.702.654,00	30.79
2022-Lombok Tengah	2.364.532.554.210,00	869.667.796.555,00	36.78
2022-Lombok Timur	3.089.302.246.686,00	953.206.134.817,00	30.86
2022-Lombok Utara	904.348.409.082,00	184.679.967.467,00	20.42
2023-Mataram	1.653.900.067.407,00	324.322.816.144,00	19.61
2023-Lombok Barat	1.740.037.330.520,00	565.269.613.201,00	32.49
2023-Lombok Tengah	2.261.190.989.048,00	792.228.165.886,00	35.04
2023-Lombok Timur	2.671.513.280.956,00	980.030.595.081,00	36.68
2023-Lombok Utara	1.057.028.843.544,00	263.345.327.028,00	24.91
2024-Mataram	1.773.100.723.748,00	352.899.646.486,00	19.90
2024-Lombok Barat	1.942.769.587.863,00	638.756.954.628,00	32.88
2024-Lombok Tengah	2.617.596.128.125,00	978.543.583.220,00	37.38
2024-Lombok Timur	3.208.094.396.887,00	1.213.571.684.070,00	37.83
2024-Lombok Utara	1.129.307.206.731,00	290.049.985.131,00	25.68

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Berdasarkan Tabel Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota di Pulau Lombok Tahun 2020–2024, seluruh daerah penelitian secara umum telah memenuhi ketentuan alokasi minimal belanja pendidikan. Namun demikian, terdapat variasi yang cukup signifikan baik dari sisi nilai nominal maupun proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja daerah.

Secara nominal, belanja pendidikan di seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan. Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah merupakan daerah dengan nilai belanja pendidikan terbesar, sejalan dengan kapasitas fiskal dan jumlah

penduduk yang lebih besar. Pada tahun 2024, belanja pendidikan Lombok Timur telah melampaui satu triliun rupiah, sedangkan Lombok Tengah mendekati satu triliun rupiah.

Dari sisi proporsi, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah secara konsisten mengalokasikan belanja pendidikan di atas 30 persen sepanjang periode penelitian, dengan proporsi tertinggi pada tahun 2024 masing-masing sebesar 37,83 persen dan 37,38 persen. Kabupaten Lombok Barat menunjukkan pola alokasi yang relatif stabil, sementara Kota Mataram memiliki proporsi belanja pendidikan yang lebih rendah dan cenderung menurun sejak 2022. Kabupaten Lombok Utara menunjukkan pola alokasi yang fluktuatif, terutama pada periode pascapandemi.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi belanja pendidikan belum tentu mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan analisis lanjutan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menilai efisiensi konversi belanja pendidikan menjadi output pendidikan di masing-masing kabupaten/kota di Pulau Lombok.

### Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Murni (APM) SD, dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sebagai indikator capaian akses dan keberlanjutan pendidikan. Berdasarkan Tabel Output Pendidikan Tahun 2020–2024, terlihat adanya perbedaan capaian output pendidikan antar kabupaten/kota di Pulau Lombok.

**Tabel 4. Output Pendidikan Tahun 2020-2024**

DMU	RLS	APM SD	APM SMP
2020-Mataram	9.46	97.66	87.08
2020-Lombok Barat	6.41	97.61	79.32
2020-Lombok Tengah	6.28	98.3	77.6
2020-Lombok Timur	6.7	93.91	79.56
2020-Lombok Utara	5.91	87.27	77.79
2021-Mataram	9.54	96.44	87.48
2021-Lombok Barat	6.42	99.39	81.19
2021-Lombok Tengah	6.29	98.25	75.8
2021-Lombok Timur	6.71	94.34	79.5
2021-Lombok Utara	6.04	88.48	77.77
2022-Mataram	9.55	96.97	91.59
2022-Lombok Barat	6.6	96.59	80.16
2022-Lombok Tengah	6.44	95.41	79.01
2022-Lombok Timur	7.04	95.34	81.27
2022-Lombok Utara	6.3	91.53	82.53
2023-Mataram	9.56	97	87.88
2023-Lombok Barat	6.87	96.58	80.65

2023-Lomok Tengah	6.61	95.46	81.48
2023-Lombok Timur	7.12	95.37	82.79
2023-Lombok Utara	6.39	91.56	81.26
2024-Mataram	9.58	96.56	87.53
2024-Lombok Barat	6.88	91.28	75.9
2024-Lomok Tengah	6.73	92.73	80.23
2024-Lombok Timur	7.36	95.45	82.64
2024-Lombok Utara	6.4	92.47	81.63

Sumber: BPS Provinsi NTB

Kota Mataram secara konsisten mencatat RLS tertinggi, yaitu sekitar 9,46–9,58 tahun, yang berada di atas rata-rata nasional RLS Indonesia pada periode yang sama (sekitar 8,48–8,9 tahun) dari tahun 2020-2024. Sebaliknya, kabupaten lain masih menunjukkan RLS di bawah standar nasional, meskipun terdapat tren peningkatan bertahap, khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang meningkat hingga 7,36 tahun pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian pendidikan menengah di sebagian besar wilayah Pulau Lombok masih belum optimal.

Dari sisi partisipasi, APM SD tahun 2024, capaian nasional berada pada angka 97,94 persen namun sel daerah di Pulau Lombok seperti masih berada kisaran 91,28-96,56 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan pada jenjang menengah pertama telah cukup baik. Namun demikian, APM SMP tahun 2024, capaian nasional berada pada angka 80,65 persen namun beberapa daerah di Pulau Lombok seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah masih berada kisaran 75,9-80,23 pada tahun 2024. di seluruh daerah relatif tinggi dan secara umum telah mendekati bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada pada kisaran 79–80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan pada jenjang menengah pertama telah cukup baik.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun belanja pendidikan relatif besar, khususnya di beberapa kabupaten, output pendidikan—terutama pada jenjang RLS, APMSD dan APMSMP—belum sepenuhnya mencapai standar nasional secara merata. Hal ini menguatkan pentingnya analisis efisiensi untuk menilai sejauh mana belanja pendidikan mampu dikonversi menjadi peningkatan capaian pendidikan yang optimal di masing-masing daerah.

### Hasil Efisiensi Pendidikan

**Tabel 5. Hasil Efisiensi Pendidikan Tahun 2020-2024**

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Efisiensi
1.	Mataram	1.000	0.997	1.000	1.000	1.000	0.999
2.	Lombok Barat	0.983	1.000	0.974	0.976	0.924	0.971
3.	Lombok Tengah	0.989	0.989	0.962	0.967	0.942	0.969
4.	Lombok Timur	0.950	0.954	0.966	0.969	0.970	0.961

5.	Lombok Utara	0.929	0.924	1.000	0.949	0.950	0.950
----	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: DEAP Versi 2.1

Berdasarkan hasil olah data efisiensi pendidikan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) berorientasi output dan asumsi Variable Return to Scale (VRS) pada lima kabupaten/kota di Pulau Lombok selama periode 2020–2024, terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran pendidikan berbeda cukup signifikan antar daerah. Dengan menggunakan batas nilai  $\geq 0,95$  sebagai kategori efisien (Sriningsih et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara yang tergolong efisien, sementara tiga daerah lainnya masih berada dalam kategori belum efisien.

Kota Mataram menunjukkan kinerja efisiensi paling tinggi dan stabil, dengan nilai efisiensi 1,000 pada tahun 2020, 2021, dan 2022; kemudian 0,999 pada 2023; dan kembali 1,000 pada 2024. Rata-rata efisiensi Kota Mataram mencapai 0,999, menjadikannya daerah paling efisien dalam penggunaan anggaran pendidikan. Kabupaten Lombok Utara juga berada dalam kategori efisien, dengan nilai efisiensi 1,000 (2020), 0,999 (2021), 1,000 (2022), kemudian menurun menjadi 0,911 (2023) dan 0,891 (2024). Meskipun terdapat fluktuasi, nilai rata-rata efisiensinya tetap tinggi, yakni 0,960, sehingga masih memenuhi batas efisiensi.

Sementara itu, tiga kabupaten lainnya yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, berada dalam kondisi belum efisien selama periode penelitian karena nilai rata-rata efisiensinya berada di bawah 0,95. Kabupaten Lombok Timur memiliki nilai efisiensi 0,875 (2020), 0,873 (2021), 0,887 (2022), 0,905 (2023), dan 0,903 (2024), dengan rata-rata 0,888. Meskipun mengalami tren kenaikan, nilai tersebut belum mencapai kategori efisien. Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan nilai efisiensi 0,867 (2020), 0,848 (2021), 0,865 (2022), 0,897 (2023), dan 0,876 (2024) dengan rata-rata 0,870, menandakan bahwa alokasi belanja pendidikan belum menghasilkan output optimal. Kabupaten Lombok Barat menjadi daerah dengan efisiensi paling rendah, dengan nilai 0,877 (2020), 0,903 (2021), 0,883 (2022), 0,894 (2023), dan turun menjadi 0,838 (2024), sehingga hanya menghasilkan rata-rata 0,879.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa daerah yang efisien dalam penggunaan anggaran pendidikan selama periode penelitian adalah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan daerah yang belum efisien adalah Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih perlu meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan agar belanja yang dialokasikan mampu menghasilkan output pendidikan yang maksimal.

### Anggaran Kesehatan

**Tabel 6. Anggaran Kesehatan Tahun 2020-2024**

DMU	Total Belanja Daerah	Belanja Kesehatan	Persen
2020-Mataram	1.457.702.553.197,18	382.484.196.848,38	26.24

2020-Lombok Barat	1.784.074.477.631,73	367.356.533.739,79	20.59
2020-Lombok Tengah	2.093.636.570.402,34	410.991.898.382,13	19.63
2020-Lombok Timur	2.596.077.594.958,00	474.616.457.171,44	18.28
2020-Lombok Utara	869.716.236.909,80	154.965.346.007,80	17.82
2021-Mataram	1.382.352.867.747,00	417.889.765.669,37	30.23
2021-Lombok Barat	1.661.844.691.560,00	350.138.402.488,05	21.07
2021-Lombok Tengah	2.118.548.957.565,00	418.243.861.778,20	19.74
2021-Lombok Timur	2.732.612.385.851,00	555.356.776.404,17	20.32
2021-Lombok Utara	850.529.068.508,00	221.803.807.847,35	26.08
2022-Mataram	1.464.164.668.856,00	152.776.700.328,00	10.43
2022-Lombok Barat	1.740.587.495.615,00	376.922.612.731,00	21.65
2022-Lombok Tengah	2.364.532.554.210,00	262.177.336.964,00	11.09
2022-Lombok Timur	3.089.302.246.686,00	594.531.422.165,00	19.24
2022-Lombok Utara	904.348.409.082,00	112.032.164.117,00	12.39
2023-Mataram	1.653.900.067.407,00	243.444.766.344,00	14.72
2023-Lombok Barat	1.740.037.330.520,00	406.459.373.744,00	23.36
2023-Lombok Tengah	2.261.190.989.048,00	462.224.215.225,00	20.44
2023-Lombok Timur	2.671.513.280.956,00	607.012.140.283,00	22.72
2023-Lombok Utara	1.057.028.843.544,00	190.968.215.814,00	18.07
2024-Mataram	1.773.100.723.748,00	252.878.436.742,00	14.26
2024-Lombok Barat	1.942.769.587.863,00	478.984.211.781,00	24.65
2024-Lombok Tengah	2.617.596.128.125,00	551.642.093.960,00	21.07
2024-Lombok Timur	3.208.094.396.887,00	731.691.303.901,00	22.81
2024-Lombok Utara	1.129.307.206.731,00	196.219.885.125,00	17.38

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Berdasarkan data anggaran kesehatan lima kabupaten/kota di Pulau Lombok periode 2020–2024, terlihat adanya dinamika yang signifikan baik dari sisi besaran maupun proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah. Perubahan pola alokasi ini mencerminkan respons kebijakan daerah terhadap pandemi COVID-19 serta proses penyesuaian pada periode pemulihan pascapandemi.

Pada tahun 2020–2021, seluruh daerah meningkatkan proporsi belanja kesehatan sebagai respons terhadap tekanan pandemi. Kota Mataram mencatat proporsi tertinggi, mencapai 26,24 persen pada 2020 dan meningkat menjadi 30,23 persen pada 2021. Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara juga menunjukkan peningkatan alokasi pada periode ini, sementara Lombok Barat dan Lombok Tengah relatif stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belanja kesehatan menjadi prioritas strategis daerah untuk mendukung layanan medis, vaksinasi, dan penanganan darurat.

Pada periode 2023–2024, sebagian besar daerah menunjukkan pola stabilisasi dan peningkatan kembali proporsi belanja kesehatan. Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah mencatat proporsi tertinggi pada akhir periode

penelitian, mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat layanan kesehatan pascapandemi. Sementara itu, Kota Mataram menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dan Lombok Utara secara konsisten berada pada tingkat alokasi terendah yang mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja kesehatan daerah bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal serta kapasitas fiskal masing-masing daerah. Perbedaan pola alokasi antar kabupaten/kota menegaskan pentingnya analisis lebih lanjut mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja kesehatan dalam menghasilkan output layanan kesehatan yang optimal.

### Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (AKB), dan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (AKI) sebagai indikator capaian akses dan capaian kesehatan. Berdasarkan Tabel Output Pendidikan Tahun 2020–2024, terlihat adanya perbedaan capaian output kesehatan antar kabupaten/kota di Pulau Lombok.

**Tabel 7. Output Kesehatan Tahun 2020-2024**

DMU	AHH	AKB	AKI
2020-Mataram	73.97	5.06	95.68
2020-Lombok Barat	71.27	2.88	98.49
2020-Lombok Tengah	71.27	9.44	141.07
2020-Lombok Timur	70.78	10.87	157.43
2020-Lombok Utara	70.28	13.48	58.61
2021-Mataram	74.08	8.06	215.83
2021-Lombok Barat	71.51	3.45	90.06
2021-Lombok Tengah	70.65	9.66	168.58
2021-Lombok Timur	70.96	9.65	183.31
2021-Lombok Utara	70.42	12.86	64.32
2022-Mataram	74.35	6.94	92.55
2022-Lombok Barat	71.94	3.45	80.17
2022-Lombok Tengah	71.02	10.18	100.76
2022-Lombok Timur	71.33	8.9	138.21
2022-Lombok Utara	70.84	14.16	70.82
2023-Mataram	74.65	11.01	87.37
2023-Lombok Barat	72.37	9.27	127.86
2023-Lombok Tengah	71.39	7.64	127.34
2023-Lombok Timur	71.72	7.51	100.45
2023-Lombok Utara	71.26	13.63	25.72
2024-Mataram	74.83	11.61	96.75
2024-Lombok Barat	72.64	5.52	47.3
2024-Lombok Tengah	71.59	7.88	139

2024-Lombok Timur	71.95	7.75	118.53
2024-Lombok Utara	71.52	10.44	84.67

Sumber: BPS Provinsi NTB

Berdasarkan tabel output kesehatan yang mencakup indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu (AKI) pada lima kabupaten/kota di Pulau Lombok selama periode 2020–2024, terlihat bahwa capaian pembangunan kesehatan menunjukkan variasi yang cukup mencolok antar daerah dan antar tahun. Pada indikator AHH, seluruh daerah cenderung mengalami peningkatan bertahap meskipun perubahan yang terjadi relatif kecil. Kota Mataram mencatat AHH tertinggi secara konsisten, meningkat dari 73,97 pada tahun 2020 menjadi 74,83 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan kualitas layanan kesehatan, akses masyarakat terhadap fasilitas, serta ketahanan sistem kesehatan yang relatif lebih baik dibanding kabupaten lainnya. Sementara itu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan terutama Lombok Utara mencatat AHH yang lebih rendah, berada pada kisaran 70 hingga 72 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan, tingkat kesehatan masyarakat di daerah-daerah tersebut masih menghadapi tantangan yang membutuhkan peningkatan fasilitas, tenaga kesehatan, serta layanan kesehatan dasar.

Indikator AKB menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dibanding AHH. Beberapa daerah mengalami peningkatan AKB pada masa pandemi dan pascapandemi, terutama Kota Mataram yang AKB-nya naik dari 5,06 per 1.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 11,61 pada 2024. Lonjakan ini menunjukkan terganggunya akses dan kualitas layanan neonatal akibat pandemi COVID-19. Lombok Utara juga mencatat nilai AKB yang relatif tinggi, terutama pada 2022 (14,16) dan 2023 (13,63), mengindikasikan adanya keterbatasan layanan persalinan aman serta rendahnya akses ibu hamil terhadap fasilitas kesehatan. Sebaliknya, Lombok Barat mencatat AKB terendah dan paling stabil, berkisar antara 2,88 hingga 5,52 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menggambarkan bahwa layanan kesehatan ibu dan anak di daerah tersebut relatif lebih baik, baik dari sisi fasilitas maupun cakupan layanan.

Indikator AKI menunjukkan pola yang lebih tidak stabil dan menjadi indikator yang paling mencerminkan tekanan sistem kesehatan selama pandemi. Kota Mataram mengalami lonjakan sangat tinggi pada tahun 2021, yaitu 215,83 per 100.000 kelahiran hidup, sebelum kembali menurun hingga 96,75 pada 2024. Lonjakan ini menunjukkan beratnya beban layanan maternal, terhambatnya rujukan persalinan darurat, serta meningkatnya risiko komplikasi kehamilan pada masa pandemi. Lombok Timur dan Lombok Tengah juga menunjukkan nilai AKI yang cenderung tinggi dan berfluktuasi, yang mengindikasikan masih terbatasnya layanan obstetri emergensi, jarak rujukan yang jauh, dan tingginya persalinan di luar fasilitas kesehatan. Berbeda dengan daerah lain, Lombok Barat menunjukkan tren perbaikan signifikan dengan nilai AKI yang terus menurun hingga mencapai 47,30 pada tahun 2024, menandakan peningkatan efektivitas layanan maternal dan peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan ibu. Lombok Utara mengalami pola yang tidak stabil, sempat mencapai titik rendah pada tahun 2023 (25,72), namun kembali meningkat pada 2024 (84,67), menunjukkan bahwa layanan maternal di daerah tersebut belum sepenuhnya stabil.

Secara keseluruhan, tabel output kesehatan menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada beberapa indikator, capaian kesehatan di Pulau Lombok masih belum merata. Kota Mataram dan Lombok Barat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik, sedangkan Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara masih menghadapi tantangan dalam menstabilkan dan meningkatkan kualitas output kesehatan, terutama pada indikator AKB dan AKI. Variasi dan fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan belanja kesehatan pada setiap daerah belum sepenuhnya menghasilkan output kesehatan yang konsisten, yang selanjutnya menjadi salah satu faktor perbedaan tingkat efisiensi antar kabupaten/kota berdasarkan hasil analisis DEA.

### Hasil Efisiensi Kesehatan

**Tabel Hasil Efisiensi Kesehatan Tahun 2020-2024**

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Efisiensi
1.	Mataram	0.989	1.000	1.000	0.998	1.000	0.997
2.	Lombok Barat	0.953	0.956	0.961	0.970	0.971	0.962
3.	Lombok Tengah	0.957	0.973	0.950	0.957	0.961	0,959
4.	Lombok Timur	1.000	1.000	0.957	0.959	0.964	0.976
5.	Lombok Utara	0.983	0.974	1.000	0.996	0.968	0.984

Sumber: DEAP Versi 2.1

Berdasarkan hasil olah data efisiensi belanja pendidikan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan orientasi output dan asumsi Variable Return to Scale (VRS) pada lima kabupaten/kota di Pulau Lombok selama periode 2020–2024, terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran pendidikan relatif tinggi di seluruh daerah. Dengan menggunakan batas nilai efisiensi  $\geq 0,95$  sebagai kategori efisien (Sriningsih et al., 2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok secara umum telah mencapai kategori efisien, meskipun terdapat fluktuasi nilai efisiensi pada beberapa daerah.

Kota Mataram menunjukkan tingkat efisiensi paling tinggi dan paling stabil selama periode penelitian. Nilai efisiensi Kota Mataram tercatat sebesar 1,000 pada tahun 2020, kemudian sedikit menurun menjadi 0,997 pada tahun 2021, dan kembali mencapai nilai maksimal 1,000 pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Dengan rata-rata efisiensi sebesar 0,999, Kota Mataram menjadi daerah dengan kinerja efisiensi terbaik dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Pulau Lombok. Tingginya nilai efisiensi ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pendidikan di Kota Mataram mampu menghasilkan output pendidikan yang relatif optimal dibandingkan daerah lainnya.

Kabupaten Lombok Barat juga tergolong efisien dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,971. Pada tahun 2020 nilai efisiensinya mencapai 0,983 dan

meningkat menjadi 1,000 pada tahun 2021. Namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi sedikit penurunan, yaitu menjadi 0,974 pada tahun 2022, 0,976 pada tahun 2023, dan turun menjadi 0,924 pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir, rata-rata nilai efisiensi Lombok Barat masih berada di atas batas efisiensi.

Kabupaten Lombok Tengah juga menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik dengan rata-rata efisiensi sebesar 0,969. Nilai efisiensinya tercatat sebesar 0,989 pada tahun 2020 dan tetap sama pada tahun 2021. Selanjutnya nilai tersebut menurun menjadi 0,962 pada tahun 2022, meningkat sedikit menjadi 0,967 pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 0,942 pada tahun 2024. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun efisiensi relatif tercapai, masih terdapat potensi peningkatan dalam optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan.

Kabupaten Lombok Timur juga berada dalam kategori efisien dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,961. Nilai efisiensi daerah ini menunjukkan tren peningkatan selama periode penelitian, yaitu dari 0,950 pada tahun 2020, meningkat menjadi 0,954 pada tahun 2021, kemudian 0,966 pada tahun 2022, 0,969 pada tahun 2023, dan mencapai 0,970 pada tahun 2024. Tren peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan sehingga output pendidikan yang dihasilkan semakin optimal.

Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara memiliki rata-rata efisiensi sebesar 0,950 yang masih berada pada batas kategori efisien. Nilai efisiensinya tercatat sebesar 0,929 pada tahun 2020 dan sedikit menurun menjadi 0,924 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dengan nilai efisiensi mencapai 1,000. Pada tahun 2023 nilai efisiensinya kembali menurun menjadi 0,949 dan sedikit meningkat menjadi 0,950 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran pendidikan di Lombok Utara masih perlu dijaga konsistensinya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok telah mencapai kategori efisien dalam penggunaan anggaran pendidikan selama periode 2020–2024. Meskipun demikian, perbedaan nilai efisiensi antar daerah dan fluktuasi yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam perencanaan serta pengelolaan belanja pendidikan agar penggunaan anggaran dapat semakin optimal dalam meningkatkan output pendidikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi belanja daerah pada fungsi pendidikan dan kesehatan kabupaten/kota di Pulau Lombok selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian efisiensi yang relatif tinggi, meskipun terdapat variasi tingkat efisiensi antar daerah. Pada sektor pendidikan, Kota Mataram menunjukkan kinerja efisiensi paling tinggi dan paling stabil dengan rata-rata nilai efisiensi mendekati satu, sehingga menjadi daerah yang paling optimal dalam mengonversi belanja pendidikan menjadi capaian output pendidikan. Sementara itu, Kabupaten

Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara juga berada dalam kategori efisien, meskipun masih mengalami fluktuasi nilai efisiensi pada beberapa tahun pengamatan sehingga belum sepenuhnya konsisten mencapai tingkat efisiensi maksimal. Di sisi lain, pada sektor kesehatan seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok secara umum juga telah mencapai tingkat efisiensi dalam pengelolaan belanja kesehatan, meskipun dengan capaian yang berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja kesehatan relatif lebih stabil dalam menghasilkan output dibandingkan sektor pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah pada sektor pendidikan dapat mempertahankan serta meningkatkan konsistensi dalam pengelolaan belanja pendidikan agar tingkat efisiensi yang telah dicapai tetap terjaga. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan perencanaan anggaran berbasis kinerja serta peningkatan keterkaitan antara program, kegiatan, dan target output pendidikan sehingga alokasi belanja yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam meningkatkan capaian indikator pendidikan. Pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi yang tinggi, seperti Kota Mataram, diharapkan dapat mempertahankan praktik pengelolaan anggaran yang efektif dan menjadikannya sebagai referensi bagi daerah lain dalam mengoptimalkan pemanfaatan belanja pendidikan. Pada sektor kesehatan, kebijakan pengelolaan belanja yang telah berjalan efisien perlu terus dipertahankan dengan tetap meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis dengan memasukkan variabel lain seperti kapasitas fiskal daerah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta faktor institusional dan kualitas layanan publik agar pemahaman mengenai determinan efisiensi belanja daerah dapat menjadi lebih komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A., & Kazemi, M. (2016). Assessing Public Spending Efficiency in 20 OECD Countries. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2787817>
- Armin Rahmansyah Nasution, Yosua Simanjuntak, Tia Handani, Rafael Benediktus, Fadhil Irfansyah, & Aisyah Fadhillah Lubis. (2024). Analisis Efisiensi Pengeluaran Publik Dalam Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 3504–3510. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.6564>
- Arsad, R. (2024). Measuring Efficiency Performance in Economic Productivity Function: Parametric and Non-Parametric Frontier Approach. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VIII(VIII), 4162–4172. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.8080315>
- Aznurita, C., Sulaiman, S., & Indriasari, D. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(6), 1503–1509. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i6.2171>

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Metode baru rata-rata lama sekolah*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/-metode-barurata-rata-lamasekolah.html>
- Boakye, K., Lee, Y. F., Annor, F. F., Dadzie, S. K. N., & Salifu, I. (2024). Data Envelopment Analysis (DEA) to Estimate Technical and Scale Efficiencies of Smallholder Pineapple Farmers in Ghana. *Agriculture (Switzerland)*, 14(7), 1–13. <https://doi.org/10.3390/agriculture14071032>
- BPS. (2024). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAzIzI=/angka-partisipasi-kasar--apk--menurut-provinsi-dan-jenjang-pendidikan.html>
- Coelli, T. J., Prasada Rao, D. S., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. In *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. <https://doi.org/10.1007/b136381>
- Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 120(3), 253. <https://doi.org/10.2307/2343100>
- Guevel, H. P., Ramón, N., & Aparicio, J. (2025). Benchmarking in data envelopment analysis: balanced efforts to achieve realistic targets. *Annals of Operations Research*, 351(2), 1403–1426. <https://doi.org/10.1007/s10479-024-06216-w>
- Herrera, S., Isaka, H., & Ouedraogo, A. (2025). Efficiency of public spending in education, health, and infrastructure: an international benchmarking exercise. *Journal of Applied Economics*, 28(1). <https://doi.org/10.1080/15140326.2025.2480985>
- Hibatulmedina, S., & Rambe, R. A. (2022). The Efficiency Analysis of Government Expenditure on Education and Health in Sumatra: The DEA Approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 223–232. <https://doi.org/10.29259/jep.v19i2.15795>
- Indriani, A. U., & Muhsyaf, S. A. (2025). Efficiency Analysis of Government Expenditure in Districts / Cities of West Nusa Tenggara Province : A Dea Approach ( 2021-2023 ). *JPEK*, 9(2), 896–907. <https://doi.org/10.29408/jpek.v9i2.30250>
- Indriani, A. U., & Muhsyaf, S. A. (2025). Efficiency Analysis of Government Expenditure in Districts / Cities of West Nusa Tenggara Province : A Dea Approach ( 2021-2023 ). *JPEK*, 9(2), 896–907. <https://doi.org/10.29408/jpek.v9i2.30250>
- Kurniawan, I., Murtala, M., & Juanda, R. (2021). Efisiensi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 15. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i3.3858>
- Kusumaningsih, R. P., Mulyadi, J., Sihite, M., & Djaddang, S. (2023). Analisis Efisiensi Bank Pemerintah Indonesia Dengan Data Envelopment Analysis - Dea. *Jurnal Akunida*, 9(2), 137–150. <https://doi.org/10.30997/jakd.v9i2.11512>
- Muhammad Rizal, Nazer, M., & Sari, D. T. (2023). Analisis Efisiensi Belanja Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Tertinggal Di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis: Berkala*

- Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, Dan Terapan Teori*, 27(2), 102–117. <https://doi.org/10.24123/jeb.v27i2.5957>
- Nuryadin, M. R., Rahayu, D., & Muzdalifah, M. (2020). Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan. *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i1.82>
- Oltulular, S. (2025). Human Capital Dynamics Are the Key to Economic Growth: Source of Value of the Future. *Economies*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/economies13080235>
- Rahmawati, I., & Muhsyaf, S. A. (2025). Analisis Efisiensi Pengeluaran Anggaran Belanja Bidang Kesehatan dan Pendidikan Metode DEA 2021-2023. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 395–405. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3782>
- Setyowati, M., & Solihin, A. (2024). Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 562–577. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4493>
- Silfia, B., Utami, A., Mazza Basya, M., Yoga, A., Fakultas Ekonomi, A., Islam, B., Sunan, U., & Surabaya, A. (2021). Efisiensi Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2018. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 17(2), 98–104.
- Simar, L., & Wilson, P. W. (2008). Statistical Inference in Nonparametric Frontier Models: Recent Developments and Perspectives. *The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Change*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195183528.003.0004>
- Sriningsih, S. (2024). *EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH Teori dan Praktik*. CV. Global Research and Publishing.
- Sriningsih, S., Haryanto, T., Solihin, A., & Sriningsih1, S. (2024). Determinants of Spending Efficiency for Education and Health Functions. *Jejak*, 17(1), 27–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jejak.v17i1.5620>